

Role of BUMDes in Community-Based River Tourism Management: Peran BUMDes dalam Pengelolaan Pariwisata Sungai Berbasis Masyarakat

Ahmad Rizal
Isnaini Rodiyah

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

General Background: Village-Owned Enterprises (BUMDes) are strategic instruments for strengthening rural economies through community-based tourism management. **Specific Background:** In Tambakcemandi Village, the BUMDes-managed river tourism and Café Kalitikung represent local initiatives to utilize natural resources for economic development, yet face managerial, human resource, and funding challenges.

Knowledge Gap: Empirical studies that comprehensively explain the concrete roles of BUMDes administrators in managing village tourism using role-based theoretical perspectives remain limited. **Aim:** This study aims to analyze the roles of BUMDes administrators in managing river tourism and Café Kalitikung in Tambakcemandi Village. **Results:** Using a qualitative descriptive approach, the findings show that BUMDes administrators perform three main roles: facilitator through provision of tourism infrastructure, mobilisator by engaging local resources and promoting environmental awareness, and regulator by establishing operational policies and environmental management rules. **Novelty:** This study offers a role-based analytical framework grounded in Edy Suhardono's theory to explain village tourism governance at the operational level. **Implications:** The findings provide practical insights for village governments and BUMDes in strengthening sustainable, community-driven tourism management models.

Highlights:

- Role-based governance in village tourism management
- Community participation and environmental awareness
- BUMDes as facilitator, mobilisator, and regulator

Keywords: BUMDes; Village Tourism; Community Development; River Tourism; Rural Economy

Pendahuluan

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah pedesaan dengan memberdayakan komunitas lokal dalam menciptakan bisnis dan inisiatif berkelanjutan [1]. BUMDes memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup di daerah pedesaan. Dalam pengelolaan pariwisata, BUMDes berpotensi menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempromosikan budaya dan warisan lokal. Melalui BUMDes, penduduk desa dapat memanfaatkan sumber daya dan keunikan yang ada untuk menghadirkan pengalaman otentik bagi wisatawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi pedesaan tetapi juga menghasilkan pendapatan bagi komunitas, melestarikan tradisi, dan mempromosikan kerajinan lokal, yang semuanya berkontribusi pada kekayaan budaya daerah. Tabel berikut menunjukkan peningkatan jumlah pendirian BUMDes di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2021:

Tabel 1. Data BUMDes dari Tahun 2014-2021

Tahun	Jumlah Bumdes
2014	8.189
2015	14.463
2016	28.595
2017	43.339
2018	49.213
2019	51.091
2020	51.134
2021	57.273

Sumber:Kemendes Pdtt

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendirian BUMDes di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2014 hingga 2021. Kebijakan Pemerintah Indonesia telah mendorong pembentukan BUMDes sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian desa. Presiden Jokowi, misalnya, telah menyatakan bahwa jumlah BUMDes telah melonjak 606 persen sejak 2014, menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan yang kuat untuk pembentukan BUMDes. Peningkatan Perekonomian Desa Dengan adanya BUMDes, desa dapat mengelola aset dan usaha mereka sendiri, ini berarti mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan pekerjaan yang tersedia.

Salah satu desa yang berpotensi mengembangkan perekonomiannya melalui BUMDes adalah Desa Tambak Cemandi. Desa Tambak Cemandi berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, memiliki potensi pariwisata yang saat ini sudah mulai dikembangkan menjadi Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung. Desa ini dikenal dengan keberadaan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. [2] Melalui program pengembangan wisata, desa ini memanfaatkan potensi alamnya untuk menarik pengunjung, baik lokal maupun luar daerah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tambak Cemandi mengelola kegiatan wisata susur sungai yang meliputi penyewaan perahu untuk kegiatan susur sungai, sehingga memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat dan ada juga usaha pemancingan di sekitar lokasi wisata.

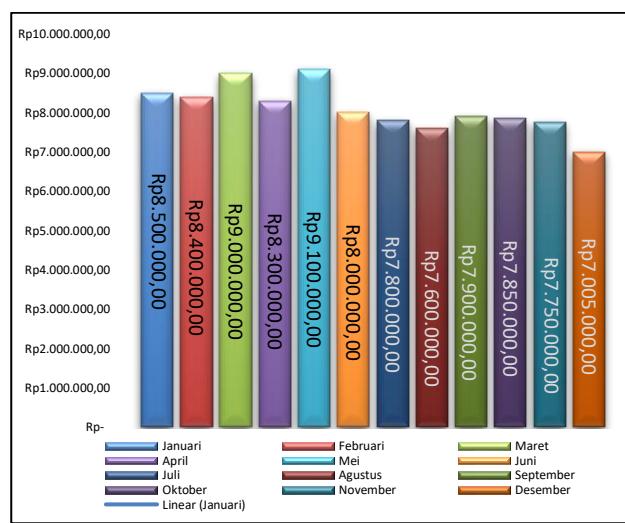
Adanya BUMDes ini, masyarakat dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti penyewaan perahu, penjualan makanan dan minuman di cafe, serta usaha kecil lainnya yang mendukung sektor pariwisata. Pemerintah berharap BUMDes ini bisa menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan potensi lokal mereka. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pengembangan BUMDes, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan, seperti peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja melalui Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung.

Namun, dalam pengoperasiannya BUMDes Wisata Susur Sungai "Cafe Kalitikung" mengalami beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran operasional wisata. Masalah tersebut bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain adalah manajemen, sumber daya manusia, dan pendanaan. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan BUMDes ini adalah kurangnya manajemen yang terampil dan efektif. Banyak pengurus BUMDes yang merupakan warga setempat tanpa keahlian khusus dalam manajemen usaha. Hal ini menyebabkan kurangnya strategi yang jelas dalam menjalankan usaha. Dengan begitu, operasi BUMDes ini tidak dapat sepenuhnya mandiri dan berkelanjutan, karena keuntungan yang minim tidak mampu menopang pengembangan usaha yang lebih besar.

Selanjutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada menjadi tantangan dalam pengelolaan BUMDes wisata. Menurut teori tentang pengelolaan BUMDes wisata, pentingnya peran BUMDes meliputi pengembangan sumber daya

manusia, pengelolaan objek wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal [3]. Namun, program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah setempat belum mencukupi kebutuhan keterampilan di dunia pariwisata. Banyak karyawan yang kurang berpengalaman dalam pelayanan pelanggan, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, sehingga berdampak langsung pada citra "Cafe Kalitikung". Di era digital, media sosial memiliki pengaruh besar dalam menarik pengunjung. Data menunjukkan bahwa sekitar 65% pengunjung mengetahui "Cafe Kalitikung" melalui media sosial. Namun, pengelola belum memaksimalkan platform ini, sehingga promosi masih terbatas pada lingkaran masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan potensi besar yang belum tergarap secara optimal[4].

Masalah lain berasal dari aspek pendanaan. BUMDes tidak memiliki akses mudah terhadap sumber pembiayaan eksternal atau investasi. Meskipun terdapat dana dari anggaran desa dan pendapatan unit bisnis, jumlahnya tidak mencukupi untuk program pengembangan yang ambisius. Misalnya, pada tahun 2023, dana investasi untuk "Cafe Kalitikung" hanya sebesar Rp 20.000.000, jauh dari kebutuhan anggaran sebesar Rp 100.000.000 untuk memperluas fasilitas dan meningkatkan mutu layanan. Tanpa tambahan modal eksternal, pengembangan usaha menjadi terhambat, sehingga usaha dan pengelolaan BUMDes secara keseluruhan mengalami stagnasi. Dapat dilihat dari gambar dibawah terkait keuangan dari Cafe Kalitikung Tahun 2023.



Gambar 1. Data Keuangan Penghasilan Cafe Kalitikung Tahun 2023

Sumber:Pemendes Dan BUMDes

Data grafik diatas mengenai pendapatan dari unit bisnis BUMDes Cafe kalitikung, juga menunjukkan adanya fluktuasi yang tidak stabil. Pada tahun 2023, sebagaimana data yang diperoleh, pendapatan mengalami penurunan hampir 18% dibandingkan awal bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidak stabilan kondisi cuaca yang berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan di lokasi sungai. Sebagian besar pengunjung yang datang ke "Cafe Kalitikung" adalah para pelancong yang ingin menikmati suasana alam sambil menyeruput kopi dan menikmati hidangan lokal. Namun, pada saat musim hujan, jumlah pengunjung cenderung menurun drastis. Pada bulan Maret sampai Mei 2023, catatan menunjukkan bahwa jumlah pengunjung berkurang sebesar 20% dari bulan sebelumnya, yang berdampak langsung pada pendapatan harian. Di samping itu, gratisnya akses ke beberapa lokasi wisata di sekitar juga menambah persaingan yang membuat BUMDes harus lebih kreatif dalam menarik pengunjung[5].

Kondisi ini tentunya harus segera ditangani, agar kedepannya pendapatan unit bisnis BUMDes Cafe Kalitikung dapat kembali meningkat dan stabil. salah satu cara yang dapat diimplementasikan yaitu dengan mengoptimalkan Peran Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks ini, peran pengurus BUMDes akan dianalisis secara komprehensif menggunakan Teori Peran dari Edy Suhardono dengan 3 (tiga) indikator penting yaitu Fasilitator, Mobilisator dan Regulator yang dapat mempengaruhi kinerja pengurus BUMDes Tambakcemadi dalam pengelolaan Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung. Peran adalah patokan yang menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang dalam menjalankan tugas di suatu jabatan. Dalam konteks ini, pengurus BUMDes memiliki peran yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: Pertama, Fasilitator yaitu peran pengurus BUMDes dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses operasional dari tempat wisata. Kedua, sebagai Mobilisator, yaitu peran pengurus BUMDes yang bertugas untuk mengarahkan atau mendorong pihak-pihak terkait agar melakukan berbagai tindakan yang berhubungan dengan pembangunan demi kepentingan bersama. Ketiga, Regulator yaitu peran pengurus BUMDes dalam menyiapkan arahan untuk menetapkan kebijakan dan aturan yang mengatur jalannya usaha wisata.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang berkaitan dengan pariwisata berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, semakin menarik. Penelitian ini akan mereferensikan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah serupa tentang pembentukan BUMDes, khususnya yang berfokus pada pengelolaan objek wisata, seperti "Cafe Kalitikung" di Desa Tambakcemadi. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa dan memberdayakan masyarakat setempat.[6]

Pada Penelitian terdahulu oleh Anjaswari dkk[7] dengan judul "Analisis Peran Pengurus Dan Dukungan Masyarakat Terhadap Bumdes Saritani Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan". Penelitian ini mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana peran

pengurus BUMDes Saritani dan kontribusi dukungan dari masyarakat Desa Rimbo Recap memengaruhi upaya BUMDes Saritani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, studi ini juga menilai dampak gabungan antara peran pengurus dan dukungan masyarakat dalam mendorong kemajuan kesejahteraan melalui BUMDes Saritani. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan teori peran pengurus sebagai landasan analisis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya yang lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian sekarang membahas pengelolaan bumdes wisata.

Penelitian kedua ini Kadir dkk[8] dengan judul "Peran Pengurus Bkmt Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016-2021 Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat". Penelitian ini mengungkapkan bahwa PD BKMT Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2016-2021 berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman keagamaan masyarakat melalui berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan tersebut, kualitas serta potensi masyarakat, khususnya para muslimah di Kabupaten Kepulauan Meranti, berhasil ditingkatkan dan dikembangkan. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan metode kualitatif dalam pelaksanaannya. Namun, perbedaannya terletak pada penggunaan teori yang diterapkan.

Penelitian ketiga ini atin dkk [9] yang bejudul "Peran pengurus lembaga kesejahteraan sosial Lks Apik mandiri dalam membina anak jalanan untuk meraih pendidikan di kelurahan kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung". LKS APIK MANDIRI membantu anak-anak jalanan. Oleh karena itu, LKS APIK MANDIRI melakukan berbagai kegiatan untuk membina siswa. Penelitian ini membahas bagaimana Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial APIK MANDIRI berperan dalam membantu anak jalanan memperoleh pendidikan di wilayah Kota Karang Raya Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kontribusi Lembaga Kesejahteraan Sosial APIK MANDIRI dalam mendukung anak jalanan untuk mendapatkan akses pendidikan di daerah tersebut.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, peran pengurus dalam penelitian ketiga ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola organisasi, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas yang aktif dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan setempat. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, fokus utama adalah untuk mengeksplorasi peran pengurus BUMDes dalam pengelolaan "Cafe Kalitikung," yang diharapkan dapat menjadi studi kasus yang representatif. Dengan mengambil pembelajaran dari penelitian terdahulu, kami berniat untuk menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dalam mengelola objek wisata serta upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model pengelolaan BUMDes yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menafsirkan data secara mendalam tanpa berusaha mencapai penalaran teoritis tertentu [10]. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian atau responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan Ketua RT sebagai informan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan sumber-sumber yang sudah ada, yang dapat ditemukan dalam sejumlah jurnal. Penelitian ini menggunakan indikator dari Teori peran yang dikemukakan oleh Edy Suhardono, meliputi 3 indikator yaitu Fasilitator, Mobilisator dan Regulator. [11]

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang didasarkan pada karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan untuk menilai kondisi serta peran pengurus BUMDes, sekaligus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Wawancara mendalam dengan informan juga dilakukan untuk menggali informasi dan data yang dibutuhkan guna mendalamai isu-isu yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan menggunakan alat elektronik seperti kamera ponsel untuk mendapatkan bukti atau gambar yang akan membantu dalam penyelesaian penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman, yang mencakup langkah-langkah pengorganisasian, pemrosesan, dan penafsiran data kualitatif, dengan tujuan untuk menghasilkan wawasan atau pola yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Proses analisis data terdiri dari empat langkah utama: 1) pengumpulan data, yang melibatkan kegiatan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fenomena yang relevan dengan lingkup penelitian; 2) reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan transformasi data yang diperoleh di lapangan; 3) penyajian data, yang bertujuan untuk menyusun data secara terorganisir agar memudahkan penarikan kesimpulan; dan 4) Penarikan kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari data yang relevan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di awal penelitian. [12]

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui analisis data primer seperti observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi dan buku terkait, penelitian ini menyoroti peran pemerintah pengurus BUMDes dalam pengelolaan Wisata Sungai "Cafe Kalitikung". Peran pengurus BUMDes tersebut dapat tercermin dalam bentuk Fasilitator, Mobilisator, dan Regulator.

Fasilitator

Peran fasilitator dalam pengurus BUMDes sangat penting sebagai penyedia dukungan yang memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata di wilayahnya. Selain itu, fasilitator juga berperan dalam mempercepat proses pembangunan dengan memperbaiki kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat setempat. Tugas ini mencakup peningkatan efisiensi dalam proses pembangunan, penyempurnaan prosedur perencanaan, serta pengaturan peraturan yang relevan dengan kebutuhan. Fasilitator bertanggung jawab untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat terkait inovasi, atas nama pemerintah atau lembaga pengelola. BUMDes, sebagai fasilitator, memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan menjembatani kepentingan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. Dengan adanya peran ini, diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang lebih baik antar berbagai pihak, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.[13] Fasilitas wisata mengacu pada berbagai sarana dan prasarana yang perlu disediakan oleh pengelola untuk memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Kebutuhan ini tidak hanya mencakup pengalaman menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata, tetapi juga mencakup kenyamanan, aksesibilitas, dan layanan tambahan yang memastikan pengalaman wisata yang memuaskan. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai, pengelola dapat menciptakan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi wisatawan, mendorong mereka untuk lebih lama tinggal dan berkunjung kembali.

Pengelolaan objek wisata Susur Sungai Café Kalitikung tidak dapat dipisahkan dari penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung objek wisata tersebut, berikut ini hasil wawancara dengan Kepala BUMDes Bapak. MASYHUDI FAQIH mengenai fasilitas yang ada di Wisata Susur sungai café kalitikung.

"salah satu fasilitas yang dibutuhkan di wisata susur sungai cafe kalitikung saat ini yaitu, pelebaran lahan parkir dan perbaikan lahan parkir agar segera di paving karena untuk kendaraan roda 4 baik itu mobil atau bus jalannya sangat ngepress. Namun fasilitas lainnya sudah ada dan jauh lebih baik dari sebelumnya seperti ban pelampung, tempat pemancingan kolam ikan, spot foto, kapal kecil untuk mengelilingi tempat wisata, warung makanan di sekitar bantaran sungai, dan toilet dan fasilitas lainnya yang seperti masnya lihat sudah ada di wisata susur sungai cafe kalitikung" – (S/24/10/2024)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata Susur Sungai Cafe Kalitikung masih menghadapi kendala dalam hal sarana, terutama terkait akses lahan parkir yang terbatas. Area parkir yang ada saat ini belum cukup luas, tidak dilengkapi dengan paving atau beton permanen, dan memiliki kapasitas yang minim, sehingga pada akhir pekan sering kali kekurangan tempat untuk memarkir kendaraan. Padahal, sarana parkir yang memadai sangat penting, karena keberadaan fasilitas parkir yang baik akan memudahkan wisatawan dalam mengunjungi lokasi tersebut. Serta kurangnya lahan untuk menambah wahana permainan untuk anak kecil. Dan renacananya akan dibangun beberapa wahana permainan baru untuk menarik pengunjung supaya berkunjung lagi ke wisata Susur sungai café kalitikung. Fasilitas yang sudah ada pada objek wisata Susur sungai café kalitikung seperti parkir kendaraan roda 2, tempat pemancingan kolam ikan, spot foto, warung makanan di sekitar bantaran sungai, toilet,tempat karoke, kapal kecil untuk mengelilingi tempat wisata dan melihat keindahan pesisir sungai yang ada di wisata tersbut.

Pengurus BUMDes juga berperan dalam pengembangan Desa Tambakcemandi sebagai tujuan wisata, kemungkinan ada faktor lain yang berperan seperti infrastruktur, pemasaran, dan tren industri pariwisata secara keseluruhan yang juga mempengaruhi keberhasilan[14]. Sebagai bagian dari upaya pengembangan produk wisata di Desa Tambakcemandi, peran pengurus BUMDes sangat terlihat melalui berbagai program yang mereka inisiasi. Pengurus BUMDes secara aktif menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan potensi wisata lokal. Berikut adalah kutipan wawancara yang mendukung temuan ini, yang disampaikan oleh Ketua BUMDes, Bapak Masyhudi Faqih:

"Ya ada, dalam rangka pengembangan produk wisata di Desa Tambakcemandi, pengurus BUMDes biasanya memfasilitasi berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan wisata local." (24/10/2024)

Pengurus BUMDes Desa Tambakcemandi berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana untuk jaring aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah desa mendengarkan dan mempertimbangkan semua kebutuhan dan suara masyarakat. Sebagai fasilitator, pengurus BUMDes juga memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah desa. Mereka melakukannya melalui musyawarah-musyawarah dusun, yang kemudian dibawa ke musyawarah desa (MusDes) dan dirumuskan Selain itu, BUMDes juga terlibat dalam proses membahas, merancang, dan menetapkan rencana dan peraturan bersama pemerintah desa. Peraturan ini digunakan sebagai standar untuk menjalankan pemerintahan desa. BUMDes dibentuk secara terstruktur berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.

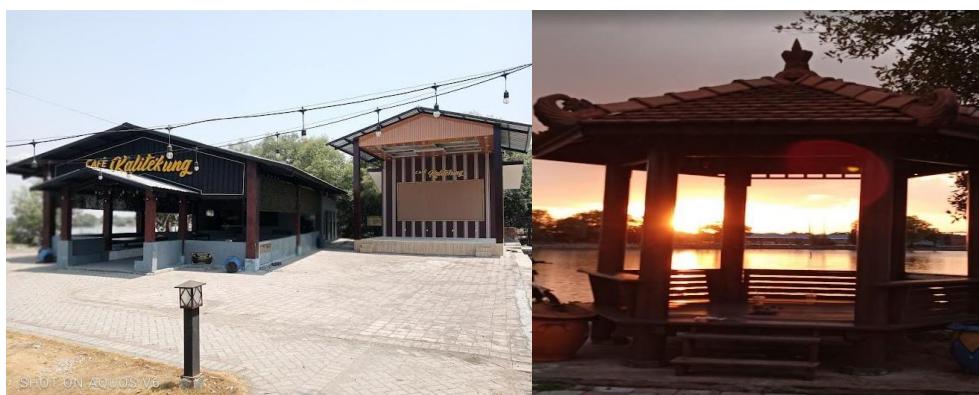
Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Bapak Khoirudin Kepala Desa Tambakcemandi sepenuhnya mendukung pengurus BUMDes untuk mengelola wisata susur sungai dan cafe kalitikung, Beliau telah menyatakan, *"Kami sudah menganggarkan dana untuk BUMDes selama 1 tahun di APBDes. Dana tersebut digunakan untuk izin dan operasional untuk mendukung aktivitas Pengurus BUMDes dalam pengelolaan wisata susur sungai cafe kalitikung (Wawancara 24/10/2024).*

Tabel 2. Rekapitulasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Wisata

No.	Tahun	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi
1.	2023	Pembangunan Tahap : TPT Halaman	Baik
2.	2023	Pembangunan Cafe(finishing)	Baik
3.	2023	Pembangunan Dermaga	Baik
4.	2023	Beautifikasi dan Pavingisasi Halaman	Baik
5.	2024	Pengadaan gazebo kayu	Baik
5.	2024	Pembangunan kamar mandi / Toilet	Baik
7.	2024	Pembangunan Tempat Parkir (pavingisasi)	Baik
8.	2024	Pembangunan gapura identitas Desa Wisata	Baik

Sumber: Dokumentasi Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung, 2024

Dari Tabel 2, terlihat bahwa Pengurus BUMDes memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam mendukung operasional dari wisata susur sungai dan cafe kalitikung. Sebagai fasilitator Pengurus BUMDes mengambil peran sebagai pelaksana utama. Dari awal pembangunan hingga sampai siap untuk dioperasikan semua dikoordinir oleh pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan wisata di desa. Pada tahun 2023, berbagai infrastruktur telah dibangun, seperti Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk menstabilkan halaman, penyelesaian pembangunan kafe sebagai tempat bersantai sekaligus sumber pendapatan desa, pembangunan dermaga guna mendukung aktivitas air seperti susur sungai, serta beautifikasi dan pavingisasi halaman untuk memperindah dan meningkatkan kenyamanan area wisata. Pada tahun 2024, fasilitas tambahan direncanakan, termasuk gazebo kayu untuk tempat istirahat pengunjung, kamar mandi/toilet untuk menunjang kebutuhan dasar dan kebersihan, area parkir yang lebih terstruktur melalui pavingisasi, serta pembangunan gapura sebagai penanda identitas desa wisata..Dengan menyediakan sarana dan prasarana ini, pengurus BUMDes menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan daya tarik wisata, kenyamanan pengunjung, dan potensi ekonomi desa. Peran mereka sebagai fasilitator memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur terpenuhi untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan desa wisata.



Gambar 3. Café Kalitikung Selesai Pengerjaan dan Gazebo
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator fasilitator, pengurus BUMDes sudah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung operasional wisata susur sungai dan cafe kalitikung. Upaya ini dilakukan agar pengunjung merasa lebih betah dan nyaman dalam menikmati wisata susur sungai dan cafe kalitikung. Fasilitas yang memadai ini mencerminkan upaya pengurus BUMDes dalam meningkatkan kualitas layanan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kunjungan dan keberlanjutan usaha. Namun, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan fasilitas tersebut tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

Namun, BUMDes masih perlu mengembangkan perannya sesuai Permendagri No 110 Tahun 2016 sebanyak 12 fungsi secara keseluruhan. Kedepan, hendaknya BUMDes menjalin sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa, masyarakat dan lembaga lainnya untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam menjalankan pengololaan wisata susur sungai café kalitikung ini. Peran yang dijalankan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Anjaswari dkk "Analisis Peran Pengurus Dan Dukungan Masyarakat Terhadap Bumdes Saritani Dalam Mendorong Peningkatan Kesejateraan Masyarakat Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan" terdapat perbedaan Penelitian terdahulu lebih mengkaji peran pengurus dalam pemberdayaan ekonomi desa secara keseluruhan. Sementara Penelitian saat ini lebih menekankan pengelolaan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan ekonomi melalui susur sungai dan kafe.[7]

Mobilisator

Peran mobilisator sangat krusial dalam menggerakkan sumber daya lokal serta memperoleh dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perkembangan dan keberhasilan suatu program atau inisiatif. Mobilisator, menurut Edy Suhardono (2016) dalam teori peran, adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menggerakkan, mengarahkan, dan mengoordinasikan sumber daya dan potensi yang ada dalam suatu

organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu[15]. Menurut Basri dkk Untuk mengembangkan dan mempertahankan operasional desa wisata seperti Susur Sungai dan Cafe Kalitikung, butuh peran pemimpin dalam pengelola BUMDes melakukan langkah-langkah penting yang dikenal sebagai Menggantung Sumber Daya dan Dukungan. Upaya tersebut mencakup upaya untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada baik dari dalam desa maupun dari luar desa, sehingga wisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Berikut hasil wawancara Ketua BUMDes, Bapak Masyhudi Faqih mengatakan:

"Untuk mendukung operasional wisata susur sungai dan kafe Kalitikung, kami menggerakkan sumber daya lokal dengan memanfaatkan tenaga kerja, modal, dan fasilitas yang ada di desa. Kami memprioritaskan penggunaan modal dari dana BUMDes dan dukungan pendanaan pemerintah serta mengoptimalkan fasilitas yang ada, seperti menggunakan produk lokal untuk kebutuhan bisnis. Kami berharap dapat menghasilkan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan pengalaman menarik kepada pengunjung"(24/10/2024)

Dalam teori Edy Suhardono (2016), dalam membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan sangat strategis. Mobilisator berfungsi sebagai penggerak yang mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Mereka berperan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya pelestarian alam, mengorganisir kegiatan lingkungan, serta memfasilitasi kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Dengan menciptakan kesadaran kolektif dan mengajak masyarakat terlibat langsung dalam aksi lingkungan, mobilisator membantu mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan alam. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat desa harus dididik tentang pelestarian alam, bisnis wisata harus menerapkan praktik ramah lingkungan, dan pengunjung harus dilibatkan dalam kegiatan lingkungan seperti membersihkan sungai. Selain itu, kesadaran akan meningkat melalui penggunaan teknologi, media sosial, dan kolaborasi dengan lembaga lingkungan. Kelestarian alam di sekitar tempat wisata juga akan termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, program penanaman pohon, dan promosi pariwisata yang berkelanjutan.



Gambar 2. Instagram Wisata Susur Sungai dan Kafe Kalitikung
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Berdasarkan gambar diatas diketahui pengurus BUMDes sudah melakukan promosi wisata susur sungai dan kafe Kalitikung di media sosial instagram. Namun, belum terlaksana secara maksimal karena konten yang diunggah masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun variasi. Selain itu, strategi pemasaran digital yang digunakan belum sepenuhnya terencana, seperti kurangnya interaksi dengan pengguna, penggunaan fitur-fitur Instagram seperti stories atau reels, serta tidak adanya penjadwalan unggahan yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam strategi promosi, termasuk pembuatan konten yang lebih menarik, penggunaan foto dan video berkualitas, serta memanfaatkan tagar dan kolaborasi dengan influencer lokal untuk meningkatkan jangkauan dan daya tarik wisata susur sungai dan kafe Kalitikung.

Pengurus BUMDes menekankan pentingnya peran mereka dalam memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan langkah ini, diharapkan dapat menjadikan lingkungan sekitar menjadi bersih dan nyaman, sehingga dapat menarik para pengunjung dan mendukung keberlanjutan wisata di desa Tambakcemandi. Berikut hasil wawancara Ketua BUMDes, Bapak Masyhudi Faqih mengatakan:

"Saya akan memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dengan memberikan pendidikan yang menekankan pentingnya bantuan wisata dan bagaimana hal itu berdampak pada ekonomi desa. Kami memberikan contoh nyata pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan lingkungan seperti menanam pohon dan membersihkan sungai. Kami berusaha menanamkan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian alam demi kemajuan pariwisata yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama melalui pendekatan partisipatif."(wawancara24/10/2024)

Berdasarkan pada wawancara diatas bahwasanya pengurus BUMDes berperan dalam menggerakkan masyarakat sekitar untuk melestarikan lingkungan dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan seperti menanam pohon dan membersihkan sungai bersama masyarakat sekitar, dapat membangun kesadaran kolektif akan tanggung jawab kita semua untuk menjaga kelestarian alam. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga menguntungkan perekonomian desa karena pariwisata yang berkelanjutan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat setempat. Kita dapat menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam menjaga alam dan kemajuan ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh kadir dkk yang berjudul "Peran Pengurus Bkmt Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016-2021 Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat". Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, baik BKMT maupun BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. [8]

Regulator

Menurut Edy Suhardono (2016:38) adalah bahwa peran regulator sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan menetapkan kebijakan yang memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengurus BUMDes bertugas untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan desa dengan mengawasi pengelolaan sumber daya, keuangan, dan kebijakan pembangunan, serta memberikan pedoman yang mengarah pada kepentingan bersama dan kemajuan yang terstruktur dan berkelanjutan[16]. Tujuan penetapan aturan operasional adalah untuk menciptakan pedoman yang jelas dan terstruktur agar kegiatan atau program dapat dilaksanakan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Proses ini termasuk identifikasi tujuan, perumusan prosedur, penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, dan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan dengan benar. Jika ada aturan operasional, proses diharapkan berjalan dengan teratur dan menghasilkan hasil yang optimal, sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Ketua BUMDes Bapak Masyhudi Faqih :

"Untuk memastikan bahwa Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung berjalan dengan teratur, aman, dan menguntungkan desa, kami telah menetapkan aturan operasional yang jelas. Pembuatan pedoman teknis dan prosedur operasi standar (SOP), sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat, dan evaluasi berkala adalah semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan aturan ini. Kami berkomitmen menjadikan aturan ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan dan reputasi desa, meskipun ada kesulitan untuk memastikan konsistensi"(wawancara 24/10/2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, pengurus BUMDes telah mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal ini pengoperasian Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Usaha Aktivitas Wisata Air. Peraturan ini mengatur terkait SOP, pelatihan karyawan, serta fasilitas wisata air yang wajib memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Dengan ini, pengurus BUMDes berupaya memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang aman dan berkualitas. Selain itu, penerapan SOP yang jelas dan pelatihan karyawan secara berkala membantu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Kebijakan Lingkungan dan Pelestarian bertujuan untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi dampak negatif dari kegiatan usaha, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian. Kebijakan ini juga mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, edukasi kepada masyarakat, dan pemantauan rutin untuk memastikan kelestarian alam. Dalam pengelolaan Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung, kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan wisata berjalan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan ekonomi desa. Menurut Ketua BUMDes Bapak Masyhudi Faqih:

"Kami telah membuat peraturan pengelolaan limbah yang membagi sampah organik dan anorganik, mengelola sampah cair, dan memberi tahu pengunjung dan orang-orang di sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi penggunaan plastik. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, semua pihak terlibat dalam penerapan aturan ini, termasuk masyarakat dan karyawan pengelola. Selain itu, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan prosedur yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih ada masalah dalam menjaga konsistensi pengelolaan limbah"(wawancara 24/10/2024)

Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMDes cafe Kalitikung telah menetapkan regulasi yang jelas terkait pengelolaan limbah dari wisata susur sungai dan Cafe Kalitikung, yang meliputi pemisahan sampah, pengelolaan limbah cair, penyediaan tempat sampah yang memadai, serta edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Penerapan regulasi ini melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk staf dan masyarakat sekitar, dengan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Meskipun ada tantangan dalam mengubah kebiasaan pengunjung, BUMDes Kalitikung terus berusaha mengelola limbah secara ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Atin 2017 "Peran pengurus lembaga kesejahteraan sosial Lks Apik mandiri dalam membina anak jalanan untuk meraih pendidikan di kelurahan kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung" terdapat perbedaan dalam konteks masing-masing, kedua organisasi ini memiliki pengaruh sosial yang signifikan. LKS Apik Mandiri meningkatkan kualitas hidup sosial dan pendidikan anak-anak

jalanan, dan BUMDes Wisata Susur Sungai meningkatkan ekonomi desa melalui sektor pariwisata. Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, keduanya sangat penting untuk meningkatkan masyarakat dan lingkungan. [9]

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan antara lain, peran pengurus BUMDes sebagai Fasilitator mengacu pada penyediaan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung operasional wisata susur sungai dan cafe kalitikung. Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi. Ada beberapa fasilitas pendukung yang telah pengurus BUMDes bangun, meliputi tempat parkir, toilet, dermaga dan gazebo yang dapat mendukung kenyamanan para pengunjung.

Peran pengurus BUMDes sebagai Mobilisator memainkan peran penting dalam menggerakkan sumber daya lokal dan membangun kesadaran lingkungan untuk mendukung keberlanjutan Wisata Susur Sungai dan Cafe Kalitikung. Dengan memanfaatkan tenaga kerja, modal, dan fasilitas desa, serta menerapkan praktik ramah lingkungan, pengurus BUMDes menciptakan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam sekitar.

Peran pengurus BUMDes sebagai Regulator yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, dan memberikan kebijakan yang efektif dan konsisten. Pengurus BUMDes telah menetapkan aturan operasional yang jelas, pembuatan pedoman teknis dan prosedur operasi standar (SOP), sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat, dan evaluasi berkala. Selain itu, pengurus BUMDes telah menetapkan regulasi yang jelas terkait kebersihan dan pengelolaan limbah dari wisata susur sungai dan Cafe Kalitikung, meliputi pemisahan sampah, pengelolaan limbah cair, penyediaan tempat sampah yang memadai, serta edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis. Dia juga telah memberikan manfaat iman, Islam, dan kesehatan kepada peneliti sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas akhir mereka, Karya Tulis Ilmiah. Berkat doa dan bantuan dari berbagai sumber, terutama doa restu dari kedua orang tua penulis, yang terus mendoakan dan mendukung peneliti untuk mencapai tahap ini dan menyelesaikan pendidikan sarjana dan menyelesaikan karya ilmiah dengan baik. Peneliti mengakui bahwa karya ilmiah ini belum lengkap dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih dengan cara ini. Semoga Karya Ilmiah ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal alamin.

References

- [1][1] Z. Ridlwan, "Urgency of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Rural Economic Development," *Fiat Justitia: Journal of Law*, vol. 8, no. 3, pp. 424–440, 2015.
- [2][2] D. Hastutik, D. Padmaningrum, and A. Wibowo, "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tourism Village Development in Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency," *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, vol. 45, no. 1, p. 46, 2021.
- [3][3] F. Mahmudah, N. Wahyuningtyas, and I. N. Ruja, "Roles and Strategies of BUMDes in Developing Cengkok Asri Tourism Park in Nganjuk Regency," *Journal of Social Sciences*, vol. 9, no. 1, pp. 45–58, 2023.
- [4][4] V. F. Vladimir, "The Role of Social Welfare Institution Administrators," *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*, vol. 1, no. 69, pp. 5–24, 2020.
- [5][5] K. F. Kamil, "Adapting Management Theory into Practice," Kuala Lumpur, Malaysia: Academic Press Malaysia, 2020.
- [6][6] I. N. M. Kasenda, M. M. V. Kasenda, and A. Lumentut, "Management of Village Fund Allocation in Development Implementation in Ranotongkor Village, East Tombariri District, Minahasa Regency," 2019.
- [7][7] D. Anjaswari, "Analysis of the Role of BUMDes Administrators and Community Support in Improving Community Welfare in Rimbo Recap Village," vol. 1, p. 167, 2020.
- [8][8] A. Kadir, "The Role of BKMT Administrators of Meranti Islands Regency (2016–2021) in Improving Religious Understanding," *Journal of Da'wah*, vol. 6, no. 1, pp. 45–65, 2023.
- [9][9] S. Atin, "The Role of Social Welfare Institution Administrators (LKS Apik Mandiri) in Supporting Street Children's Access to Education," Bandar Lampung, Indonesia, 2017.
- [10] [10] Sugiyono, *Educational Research Methods: Quantitative, Qualitative, and R&D Approaches*, Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017.
- [11] [11] E. Suhardono, *Role Theory: Concepts, Derivations, and Implications*, Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- [12] [12] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed., Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2012.
- [13] [13] Ministry of Tourism and Creative Economy, *Strategic Plan of the Ministry of Tourism and Creative Economy 2020–2024*, Jakarta, Indonesia, 2020.
- [14] [14] H. Alimuddin, A. Abdullah, and F. Razak, "Digital Marketing Training to Improve the Competitiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Products," *Journal of Community Empowerment (IPMAS)*, vol. 3, no. 3, pp. 174–182, 2023.
- [15] [15] M. Basri, Y. Yulianto, and I. Prihantika, "The Leadership Role of Village Heads in Improving the Village Development Index in Pringsewu Regency," *Pesirah: Journal of Public Administration*, vol. 2, no. 1, pp. 15–24, 2023.
- [16] [16] K. Candi and K. Sidoarjo, "The Role of Village Government in Waste

Management at Wedoroklurak Village," 2022.